



Informasi APBN 2023

Peningkatan Produktivitas
untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan



Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Disusun oleh

Tim Kementerian Keuangan

Editor:

Dit. PAPBN DJA

Ide dan Konsep

Bayu Segara

Reza Ibnu Prakoso

Data yang digunakan dalam buku ini

2019-2021 : LKPP *Audited*
2022 : *Outlook* APBN
2023 : APBN

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2023 telah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 27 Oktober 2022.

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diproyeksikan akan ditopang permintaan domestik di tengah ketidakpastian kinerja perekonomian global. APBN Tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas dengan melanjutkan penguatan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur, reformasi penganggaran guna mewujudkan belanja yang lebih efisien dan berkualitas, dan akselerasi transformasi ekonomi, yang antara lain meliputi: (1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital dan ekonomi hijau; dan (3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri.

Dengan motivasi mewujudkan APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel, buku Informasi APBN 2023 ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan bentuk transparansi Pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan - kebijakan yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan hingga buku Informasi APBN 2023 yang dikemas sederhana tetapi sarat informasi ini dapat terbit. Besar harapan kami buku ini dapat memberikan pencerahan mengenai APBN 2023 dan arah kebijakan pembangunan Indonesia.



Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan RI



Daftar Isi

Kata Pengantar	i	Belanja K/L	20
Daftar Isi	ii	Anggaran Tematik	22
Fokus Kebijakan Fiskal 2023.....	2	Belanja Subsidi	37
APBN 2023 dioptimalkan sebagai Shock Absorber	4	Transfer ke Daerah	39
Target Pembangunan	6	DAK Fisik.....	40
Asumsi Dasar Ekonomi Makro	7	DAK Nonfisik.....	41
Postur APBN	8		

PENDAPATAN NEGARA 9

Penerimaan Perpajakan.....	11
Penerimaan Pajak.....	13
Kepabeanan dan Cukai	14
Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	15

BELANJA NEGARA 16

Belanja Pemerintah Pusat	18
BPP menurut fungsi	19

PEMBIAYAAN & DEFISIT ANGGARAN 42

Pembiayaan Anggaran.....	44
Pembiayaan Utang.....	45
Pembiayaan Investasi	46



APBN



Fokus Kebijakan Fiskal 2023



Penguatan Peran APBN dan Melanjutkan Konsolidasi Fiskal Berkualitas

Mobilisasi Pendapatan

- Menjaga Efektivitas Implementasi UU HPP
- Penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan WP
- Mengantisipasi pelemahan ekonomi global dan harga komoditas yang lebih rendah di tahun 2023

Belanja Berkualitas

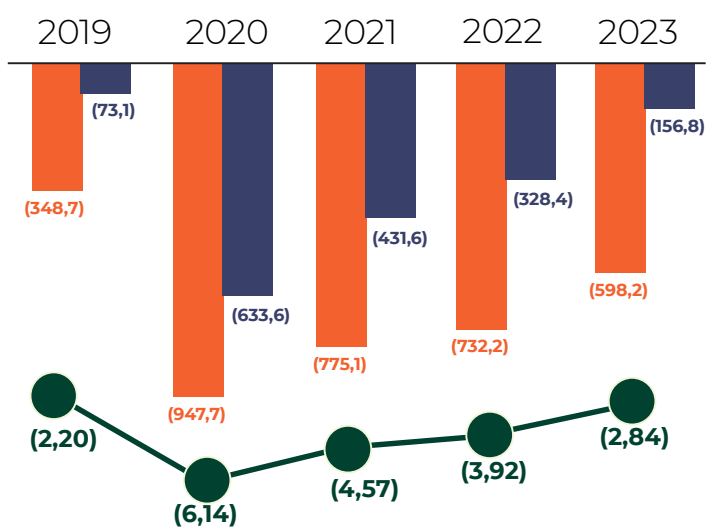
- Efisien, efektif, prioritas, transparan, dan akuntabel
- Fokus pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi
- Antisipasi ketidakpastian

Pembiayaan Inovatif

- Pengendalian risiko utang
- Meningkatkan peran Swasta, BUMN, BLU, SWF, SMV
- Pemanfaatan SAL untuk stabilisasi dan antisipasi ketidakpastian

APBN 2023 mendukung konsolidasi untuk menjaga kesinambungan fiskal

- Defisit (triliun Rupiah)
- Keseimbangan Primer (triliun Rupiah)
- Defisit thd PDB (%)



Optimis & Waspada

“OPTIMIS”

KINERJA POSITIF PEREKONOMIAN

- ✓ Pemulihan ekonomi menguat (pertumbuhan ekonomi tahun 2022 Triw I: 5,01%, Triw II: 5,44%, Triw III: 5,72%)
- ✓ Sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif
- ✓ Konsumsi menguat, ekspor solid, investasi tumbuh, neraca perdagangan positif
- ✓ Laju inflasi Indonesia jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain (peran APBN sebagai *shock absorber*)

“WASPADA”

RISIKO KETIDAKPASTIAN MASIH TINGGI

- ✓ *Scarring effect* dan inflasi yang tinggi berpotensi memicu stagflasi
- ✓ Perlambatan ekonomi global berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik
- ✓ Perang di Ukraina menyebabkan gangguan sisi penawaran (harga komoditas tinggi)
- ✓ Pengetatan kebijakan moneter secara agresif dapat meningkatkan *cost of fund* dan tekanan terhadap nilai tukar

APBN Dioptimalkan untuk Menahan Gejolak (*Shock Absorber*)

dalam Merespons Ketidakpastian Global yang Meningkat



Di tengah kenaikan harga komoditas dan risiko eskalasi ketidakpastian global
"APBN Harus Waspada, Antisipatif dan Responsif"

APBN sebagai *Shock Absorber*

- ✓ Mengendalikan Inflasi dan menjaga daya beli masyarakat
- ✓ Mempertahankan Momentum Pemulihan (mengurangi pengangguran & tingkat kemiskinan)
- ✓ Menjaga prioritas belanja (memperkuat produktivitas dan fondasi perekonomian nasional)

Optimalisasi Pengeluaran: Subsidi, Kompensasi, Perlindungan Sosial, dan belanja prioritas (dukungan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan reformasi struktural)

Menjaga Kesehatan APBN
Jangka Menengah -
Panjang

Momentum Penguatan Ketahanan Fiskal

- ✓ Menyiapkan *buffer* untuk mengantisipasi ketidakpastian
- ✓ Memperkuat fondasi konsolidasi dan keberlanjutan fiskal



Konsolidasi dan
Reformasi Fiskal



Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sejalan dengan Tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka APBN akan terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi Masyarakat. Pada APBN tahun 2023 akan difokuskan untuk peningkatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural yang didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas dan efisiensi belanja negara, serta keberlanjutan pembiayaan anggaran.

Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan akan mencapai 5,3 persen. Kinerja tersebut ditujukan bersifat inklusif dan berkelanjutan yang tercermin dari target indikator kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (*gini ratio*) yang diharapkan masing-masing berada pada kisaran 7,5-8,5 persen dan 0,375-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.



Target Pembangunan 2023



Tingkat Pengangguran (%)

5,3 – 6,0



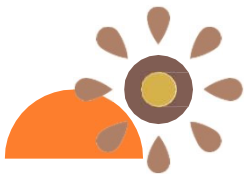
Indeks Pembangunan Manusia

73,31 – 73,49



Tingkat Kemiskinan (%)

7,5 – 8,5



Gini Ratio

0,375 – 0,378



Nilai Tukar Petani

105-107

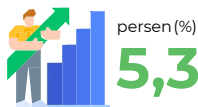


Nilai Tukar Nelayan

107-108



Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2023



Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relatif kuat didukung oleh fundamental makro ekonomi yang *robust* serta transformasi ekonomi



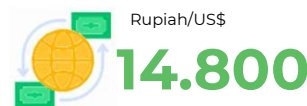
Inflasi

Laju inflasi dijaga dalam rentang sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0$ dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan dan energi serta intervensi harga



Tingkat Bunga SUN 10 Tahun

Fundamental makro ekonomi yang terjaga baik, serta strategi pembiayaan yang pruden dan kredibel akan terus dilakukan sehingga dapat menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan investor untuk berinvestasi pada pasar domestik



Nilai Tukar

Solidnya fundamental ekonomi domestik dan reformasi struktural yang berkesinambungan serta bauran kebijakan fiskal dan moneter akan menopang stabilitas nilai tukar Rupiah



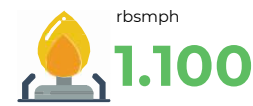
Harga Minyak Mentah

Harga minyak mentah di tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perang Rusia-Ukraina, perkembangan kasus Covid-19 di Tiongkok, dan resesi ekonomi serta keberlanjutan sanksi yang dikenakan pada Iran dan Venezuela



Lifting Minyak

Berbagai upaya dalam rangka peningkatan *lifting* migas nasional akan terus dilakukan diantaranya mendorong percepatan proyek-proyek migas baru, menjaga level produksi lapangan *existing*, serta perbaikan regulasi dan insentif fiskal



Lifting Gas

APBN 2023

defisit dibawah 3% PDB



Pendapatan Negara

Rp2.463,0 T

Tumbuh 1,1% dari *outlook* 2022 terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif



Perpajakan

Rp2.021,2 T

Tumbuh 5,0% dari *outlook* 2022 seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik serta implementasi reformasi perpajakan



PNBP

Rp441,4 T

Turun 13,6% dari *outlook* 2022 dipengaruhi oleh normalisasi harga komoditas



Hibah

Rp0,4 T

Sejalan dengan proyeksi hibah luar negeri yang terencana



Belanja Negara

Rp3.061,2 T

Belanja Negara diproyeksikan Rp3.061,2 T (turun 3,4% dari *outlook* 2022) dalam rangka pelaksanaan konsolidasi fiskal



Belanja Pemerintah Pusat

Rp2.246,5 T

Alokasi belanja pemerintah pusat turun 5,2% dari *outlook* 2022 sejalan dengan peningkatan kualitas belanja (*spending better*) dan konsolidasi fiskal



Transfer ke Daerah

Rp814,7 T

Alokasi transfer ke daerah meningkat Rp15,6 triliun atau 2,0% dari *outlook* 2022, sejalan dengan pelaksanaan UU HKPD



Defisit Anggaran

(Rp598,2 T)



Pembiayaan Anggaran

Rp598,2 T

Pembiayaan utang yang turun sekitar 8,1% terhadap *outlook* 2022

Pendapatan Negara



Pendapatan Negara 2023



Sejalan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan efektivitas UU HPP, serta optimalisasi PNBP melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif, **pendapatan negara** pada APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun. Kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP.

Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai Rp2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0 persen. Optimalisasi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan dukungan efektivitas implementasi kebijakan (Undang-Undang HPP, penguatan pengawasan dan kepatuhan, serta reformasi administrasi perpajakan. Di sisi lain, Pemerintah akan terus mewaspadaikan faktor risiko pelemahan perekonomian global dan moderasi harga komoditas yang dapat memengaruhi penerimaan perpajakan tahun 2023.

Selanjutnya **PNBP** diperkirakan mencapai Rp441,4 triliun. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi PNBP tahun 2023 adalah proyeksi pergerakan harga komoditas yang diperkirakan mengalami moderasi. Sementara itu, kontribusi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan diupayakan dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, target penerimaan **hibah** pada APBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,4 triliun sesuai proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (*Momerandum of Understanding*).





Penerimaan Perpajakan

Perkembangan kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain fluktuasi harga komoditas, pandemi Covid-19, kebijakan Pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi global. Sebelum pandemi Covid-19, penerimaan perpajakan tahun 2018–2019 tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun. Pada tahun 2018, tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan mendongkrak mendorong kinerja pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai *double digits*. Namun demikian, penurunan harga komoditas serta ketidakpastian global akibat perang dagang Amerika-Tiongkok berimbas pada melambatnya penerimaan perpajakan di tahun 2019 yang hanya tumbuh 1,8 persen.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memberikan tekanan cukup dalam terhadap perekonomian global dan domestik sebagai dampak pembatasan sosial. Kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif membuat kinerja perpajakan tahun 2020 mengalami kontraksi 16,9 persen. Upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah baik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional, membuahkan hasil positif secara bertahap. Pada tahun 2021, kinerja perpajakan mampu *rebound* dan tumbuh positif sebesar 20,4 persen.

Kinerja positif pemulihan ekonomi memberikan dorongan sangat kuat bagi capaian penerimaan perpajakan semester I tahun 2022 dan diperkirakan akan dapat dijaga sampai dengan akhir tahun 2022. Beberapa faktor yang turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan yakni (1) implementasi UU HPP yang berupa program pengungkapan sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN; (2) dampak kenaikan harga komoditas; (3) *low-base effect* sebagai dampak pemberian insentif fiskal tahun 2021. Bauran faktor-faktor tersebut akan mendorong kinerja penerimaan perpajakan pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh mencapai 24,4 persen.

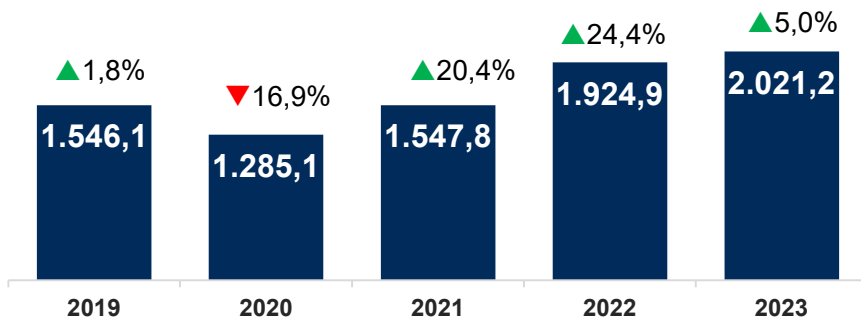
Selanjutnya penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai Rp2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0 persen dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mendukung antara lain implementasi UU HPP, aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin membaik, serta upaya optimalisasi dari sisi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak.



Penerimaan Perpajakan

Tumbuh 5,0%, Penerimaan Perpajakan 2023 diperkirakan Rp2.021,2 T

▲ Kenaikan (%) ▼ Penurunan (%)



Kebijakan Perpajakan

- Penguatan pengawasan dan kepatuhan
- Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan
- Menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang HPP.
- Insentif perpajakan yang lebih terarah

tumbuh
6,8%

Penerimaan Pajak

ditopang pemulihan ekonomi dalam negeri



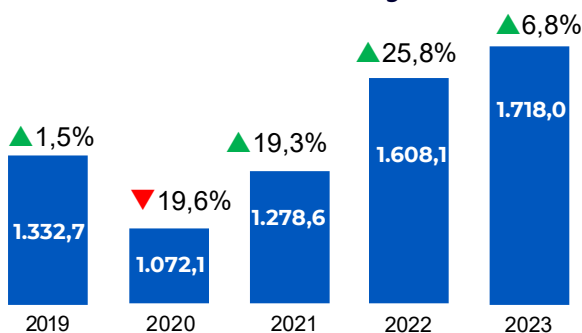
terkontraksi

4,3%

Kepabeanan & Cukai

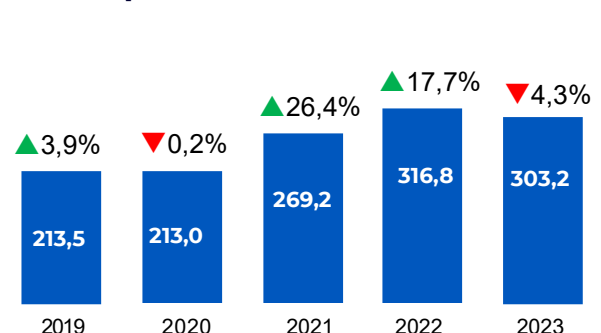
karena Bea Keluar yang lebih rendah dipengaruhi moderasi harga komoditas

Penerimaan Pajak



■ Penerimaan Pajak
(triliun Rupiah)

Kepabeanan & Cukai



■ Kepabeanan & Cukai
(triliun Rupiah)

▲ Kenaikan (%) ▼ Penurunan (%)

Penerimaan Pajak

Rp1.718,0

triliun

didukung peningkatan kontribusi PPN sejalan keberlanjutan implementasi kebijakan tarif PPN dan prospek permintaan dalam negeri yang tetap tumbuh

Dukungan Kebijakan Pajak

Implementasi aturan turunan UU HPP (a.l integrasi data perpajakan).

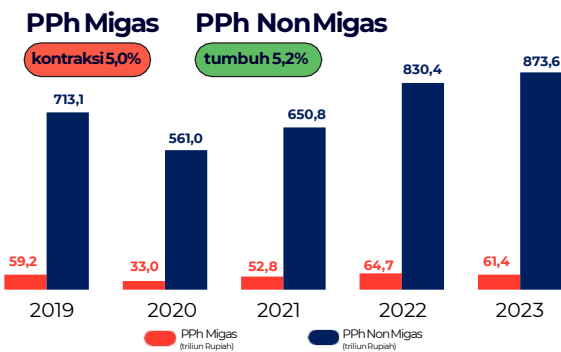
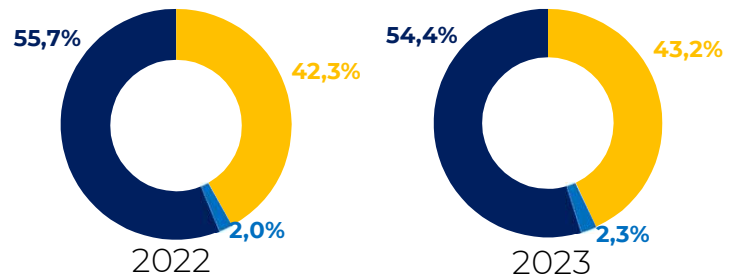
Penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan WP.

Penguatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis, pengawasan, dan penegakan hukum.

Insentif pajak yang terarah dan terukur.

Kontribusi Per Jenis Pajak

■ PPh ■ PPN & PPn BM ■ PBB dan Pajak Lainnya



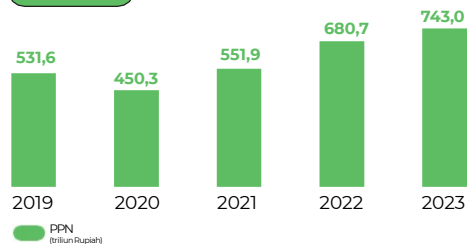
Penerimaan PPh

PPh Migas Rp61,4 T basis harga minyak yang lebih rendah

PPh Non migas Rp873,6 T a.l memperhitungkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dan penerimaan tahun 2022 yang tidak berlanjut

PPN dan PPn BM

tumbuh 9,1%

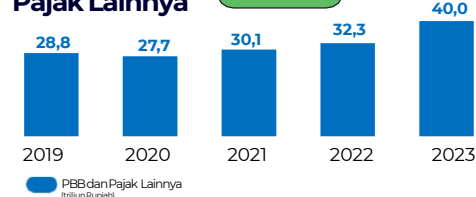


Penerimaan PPN & PPn BM

PPN mencapai Rp743,0 T, dipengaruhi a.l tumbuhnya konsumsi domestik serta keberlanjutan implementasi tarif PPN

PBB & Pajak Lainnya

tumbuh 23,9%



PBB dan Pajak Lainnya

PBB dan pajak lainnya mencapai Rp40,0 T terutama didukung peningkatan objek pajak PBB-P3.

Kepabeanan & Cukai

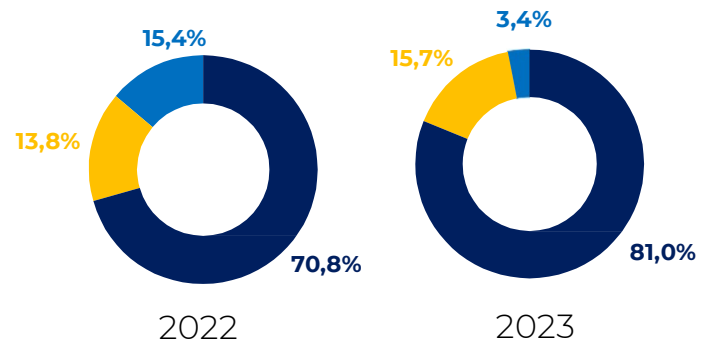
Rp303,2

triliun

didukung penerimaan Cukai, sementara Kontribusi Bea Keluar menurun mengikuti harga komoditas ekspor utama yang diperkirakan lebih rendah

Kontribusi terhadap total Kepabeanan dan Cukai

■ Cukai ■ Bea Masuk
■ Bea Keluar



Dukungan Kebijakan Kepabeanan & Cukai

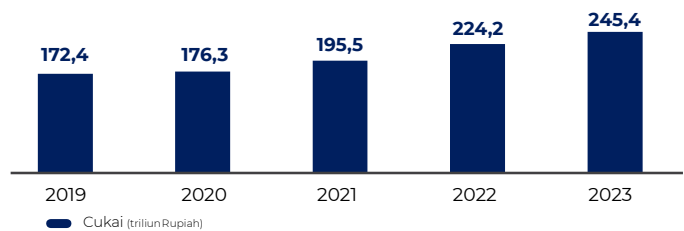
Pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE) dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional;

Peningkatan efektivitas pengawasan *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance* (audit)

Optimalisasi kerja sama internasional penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas serta Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Penerimaan Cukai

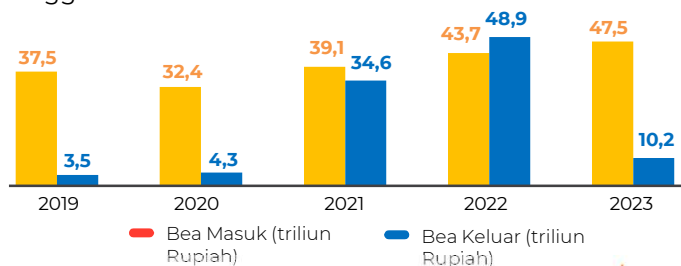
Penerimaan cukai mencapai Rp245,4 T (81,0% total penerimaan BC), tumbuh 9,5% didukung kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai serta penerimaan dari MMEA sejalan membaiknya sektor pariwisata.



Pajak Perdagangan Internasional

Bea Masuk mencapai Rp47,5 T (15,7% total penerimaan BC), meningkat 8,8% dipengaruhi proyeksi kinerja impor yang diperkirakan masih tinggi.

Bea Keluar mencapai Rp10,2 T (3,4% total penerimaan BC), dipengaruhi harga CPO dan turunannya yang diproyeksikan lebih rendah



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp441,4

triliun

PNBP mengalami pergerakan yang fluktuatif pada tahun 2018-2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,7 persen terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas, optimalisasi penyelenggaraan layanan K/L, serta pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada tahun 2020, kinerja PNBP mengalami penurunan sebesar 15,9 persen disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan perekonomian dan penurunan harga komoditas yang signifikan.

Kinerja PNBP ini mengalami perbaikan di tahun 2021 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik. PNBP tahun 2021 tumbuh 33,4 persen dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas terutama minyak bumi, minerba, dan kelapa sawit, serta peningkatan pendapatan dari layanan K/L.

Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022, terlihat dari capaian positif di semester I tahun 2022. Capaian ini masih didukung oleh tren peningkatan harga komoditas minyak bumi, minerba, serta membaiknya kinerja BUMN. Berdasarkan hal tersebut serta memperhitungkan kebijakan optimalisasi PNBP yang dilakukan Pemerintah, sampai dengan akhir tahun 2022 PNBP diperkirakan akan tumbuh sebesar 11,4 persen.

PNBP pada APBN tahun 2023 diperkirakan mencapai **Rp441,4 triliun** didukung oleh kebijakan optimalisasi pemanfaatan SDA, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pengelolaan aset BMN, serta penguatan tata kelola.



Rp196,0 T

Pendapatan Sumber Daya Alam

Dipengaruhi prospek harga komoditas Migas dan Minerba yang tidak setinggi tahun 2022 dan optimalisasi *lifting* migas.



Rp113,3 T

Pendapatan PNBP Lainnya

Penjualan Hasil Tambang dan DMO lebih rendah sejalan moderasi harga komoditas minyak dan minerba.

Optimalisasi PNBP K/L melalui peningkatan kualitas layanan, pengelolaan aset BMN dan peningkatan sinergi antar instansi terkait.



Rp49,1 T

Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan

Optimalisasi KND melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN untuk meningkatkan kinerja BUMN.



Rp83,0 T

Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU Sawit sejalan normalisasi harga CPO yang diperkirakan tidak setinggi tahun 2022.

Pendapatan BLU layanan didukung oleh perluasan dan simplifikasi layanan serta optimalisasi pemanfaatan kas BLU.

Belanja Negara





Belanja Negara 2023

Belanja negara memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19. Untuk itu, belanja negara dirancang secara ekspansif atau *countercyclical* untuk mengakomodasi tekanan terhadap perekonomian saat ini, di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19, adanya tantangan dan risiko baru dari faktor global yang berasal dari sisi ekonomi, geopolitik, dan keuangan. Keberhasilan Pemerintah dalam menjaga fondasi perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 s.d. 2022 memberikan optimisme di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai tekanan yang muncul akibat proses pemulihan ekonomi global yang mendorong terjadinya *supply disruption*, yang diimplifikasi dengan konflik Rusia – Ukraina terutama berdampak kepada volatilitas komoditas energi dan pangan, serta respon kebijakan di banyak negara maju dalam menjaga tingkat inflasi melalui kebijakan peningkatan suku bunga. Kebijakan Pemerintah yang responsif, terukur, dan terarah melalui intervensi di bidang kesehatan melalui langkah menjaga mobilisasi dan pelaksanaan program vaksinasi yang masif, kemudian diikuti dengan berbagai program yang difokuskan pada pemulihan sosial- ekonomi, termasuk stimulus bantuan sosial kepada masyarakat dan dunia usaha terbukti mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam mengatasi pandemi Covid-19.

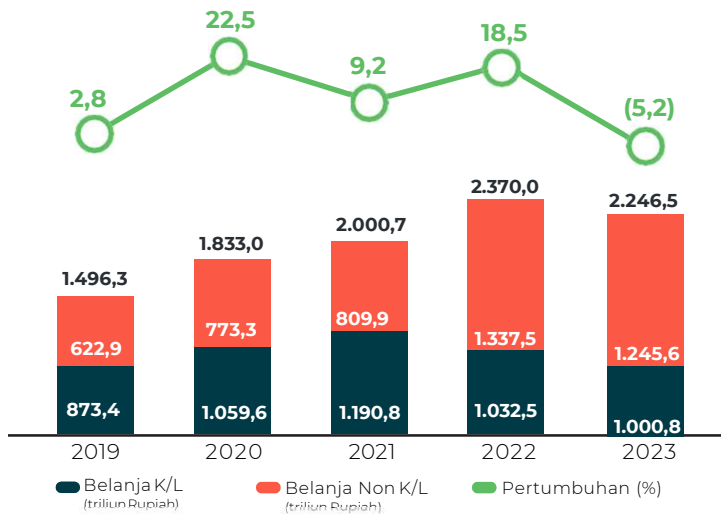
Di sisi lain, belanja negara juga perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya, mengingat pada tahun 2023 batasan defisit kembali ke maksimum 3 persen PDB

Pemerintah sangat selektif dalam mengawal proses penyusunan belanja negara dalam APBN tahun 2023 agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian. Atas hal tersebut diatas, kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan antara lain untuk: 1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial; 2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (a.l. TIK, konektivitas, energi, dan pangan), termasuk pembangunan IKN untuk mempercepat berdirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; 3. Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas; 4. Meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran; 5. Memperkuat pelaksanaan spending better melalui belanja yang berorientasi kepada hasil; 6. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; serta 7. Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian. Selain itu, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) juga diharapkan akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan sehingga terjadi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Belanja negara pada APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.245,6 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.**

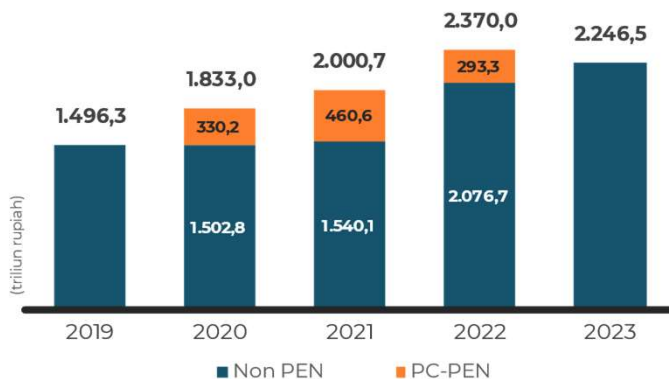
Belanja Pemerintah Pusat

Rp2.246,5
triliun

peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural, pencapaian target pembangunan dan penyediaan *fiscal buffer*



Belanja BPP Tahun 2023, sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid serta peningkatan kualitas belanja dan konsolidasi fiskal (defisit kembali di bawah 3% dari PDB)



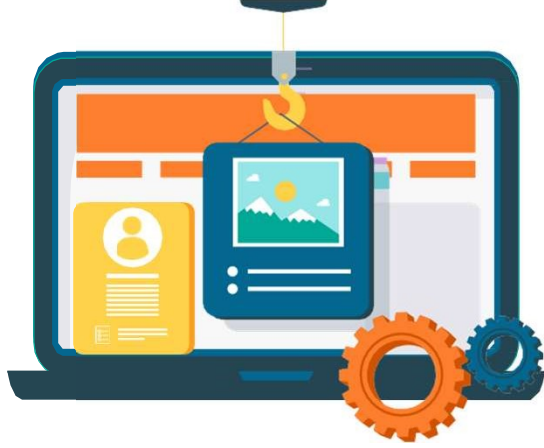
Kebijakan a.l

- Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif dan berdaya saing, melalui:
 - peningkatan kualitas pendidikan
 - transformasi sistem kesehatan
 - akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif
- Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi
- Mendukung revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor
- Mendukung adaptasi teknologi hijau, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transisi energi
- Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi
- Meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi
- Melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas
- Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN

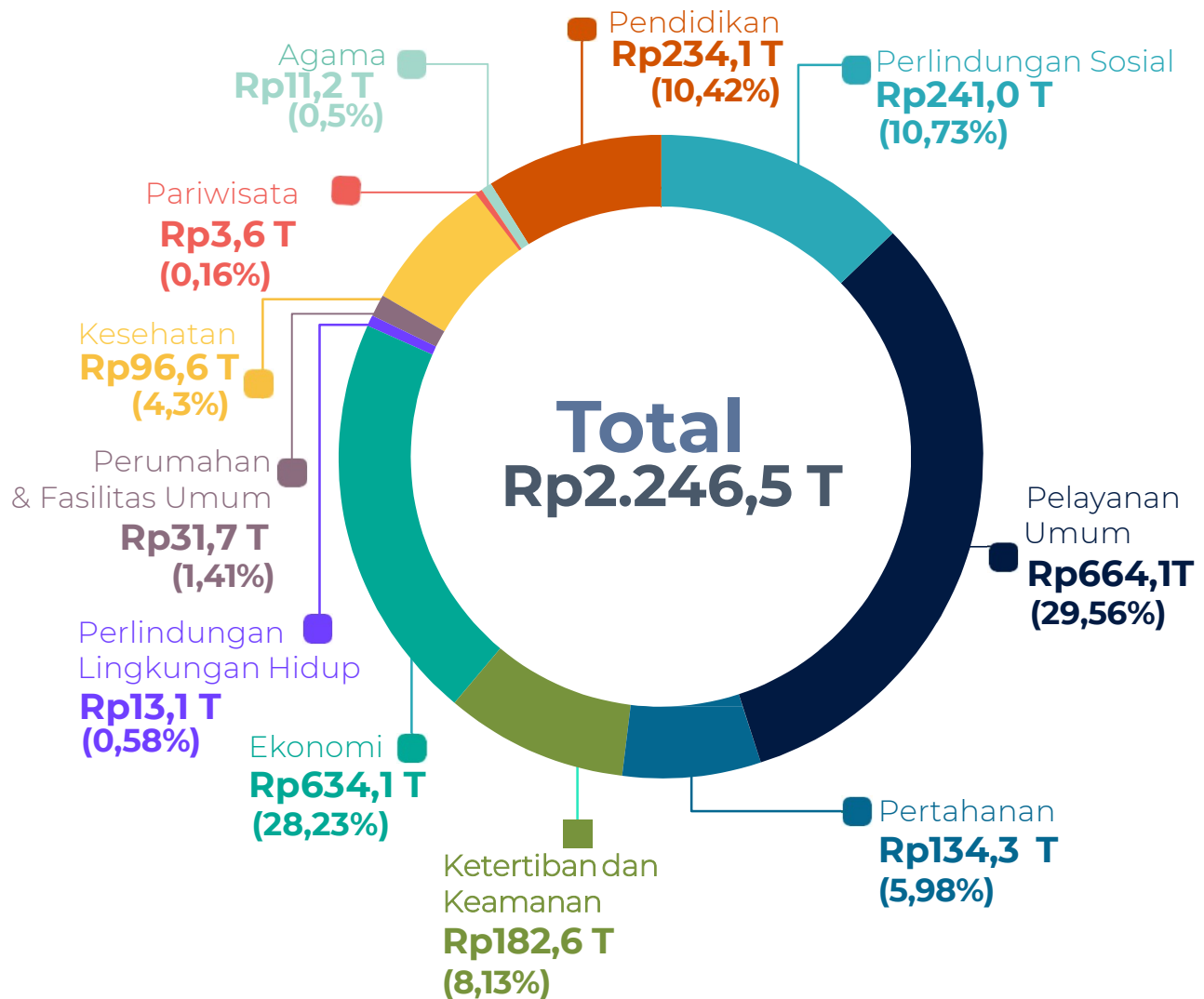
Belanja K/L
Rp1.000,8 T



Belanja Non K/L
Rp1.245,6 T



Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

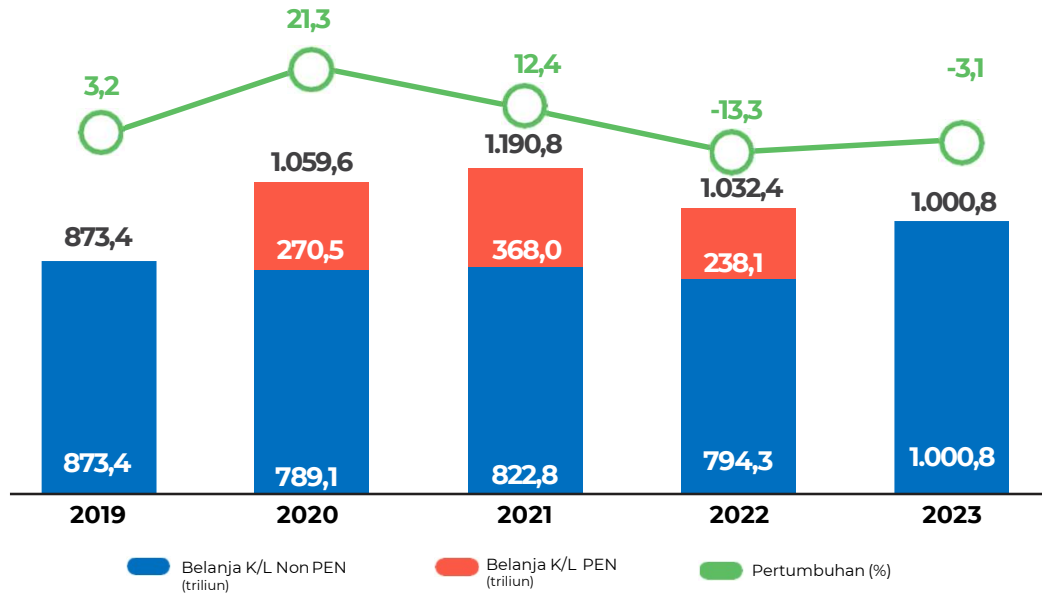


Belanja Kementerian/Lembaga

Rp1.000,8

triliun

Diarahkan semakin berkualitas (*spending better*) melalui belanja yang semakin efektif, efisien, produktif, serta memiliki daya ungkit kepada perekonomian



Mendukung pembangunan IKN

a.l. Kemen.PUPR, Polri, Kemenhub, KLHK, BKPM

a.l. untuk:

- Pembangunan sarana dan prasarana IKN
- Promosi investasi IKN

Mendukung persiapan pemilu

a.l. KPU, Bawaslu, Polri, Kemendagri, RRI

a.l. untuk:

Dukungan Tahapan dan Pengamanan Pemilu

Mendukung penyelesaian infrastruktur prioritas

a.l. KemenPUPR, Kemenhub, KemenESDM, Kemenkominfo, dan Kementan)

a.l. untuk:

pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas

Mendukung pertahanan dan keamanan

a.l. Kemenhan dan Polri untuk penguatan stabilitas politik, hukum, dan keamanan

10 Kementerian/ Lembaga dengan Pagu Terbesar



Kemenhan

Rp134,3 T



Kemen PUPR

Rp125,2 T



Polri

Rp111,1 T



Kemenkes

Rp85,5 T



Kemendikbudristek

Rp80,2 T



Kemensos

Rp78,2 T



Kemenag

Rp70,5 T



Kemenkeu

Rp45,2 T*



Kemenhub

Rp33,4 T



Kemenkominfo

Rp19,7 T



*] termasuk anggaran BLU di Kemenkeu, a.l. BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan LPDP



Anggaran Kesehatan

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas SDM. Sejak tahun 2018-2021, realisasi anggaran kesehatan tumbuh rata-rata 41,9 persen per tahun, yang tentunya juga diiringi oleh perbaikan output di bidang kesehatan.

Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Anggaran Kesehatan dalam APBN tahun 2023 utamanya dialokasikan Pemerintah melalui Belanja Pusat (Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, Kemenhan, dan Polri, serta Belanja Non K/L) dan melalui TKD

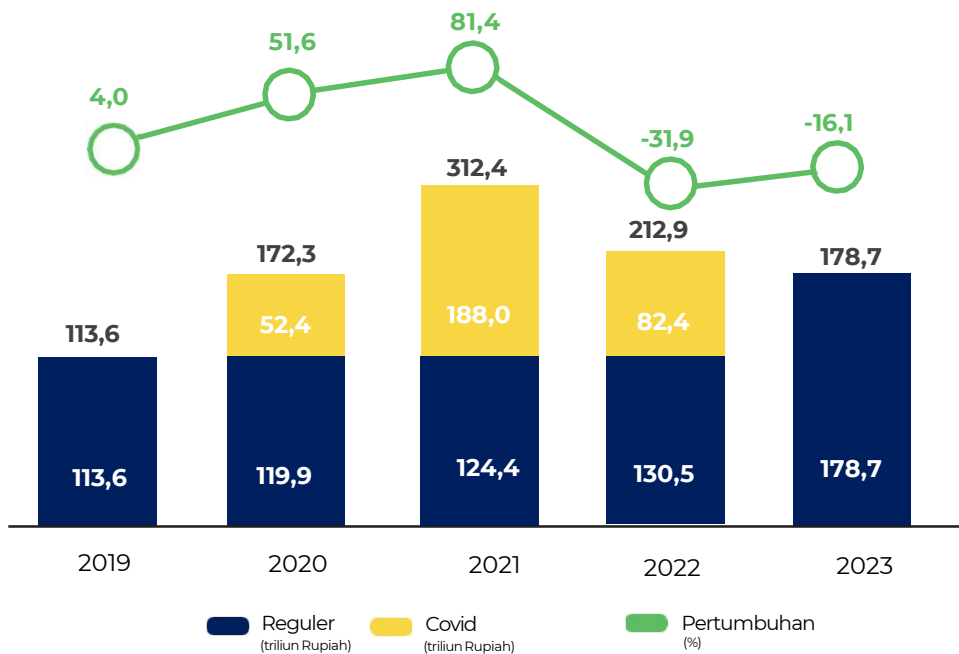


Anggaran Kesehatan

Rp178,7

triliun

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta



Seiring kasus Covid-19 yang semakin terkendali, serta peralihan dari pandemi ke endemi di tahun 2023, **mendorong normalisasi kegiatan termasuk dalam pelayanan kesehatan reguler (non Covid)**

Anggaran Kesehatan 2023 reguler tumbuh 37,0% dibandingkan outlook 2022 reguler, di antaranya untuk transformasi sistem kesehatan dan percepatan penurunan *stunting*

Target Output Prioritas



Cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa

Penyediaan makanan tambahan bagi 50.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 138.889 balita kurus

Sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 2.000 orang

Penugasan khusustenaga kesehatan sebanyak 5.200 orang (secara tim 1.200 orang dan secara individu 4.000 orang)

Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga

Sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.513 sampel

Pembangunan RS Pratama sebanyak 18 RS

Pembangunan/rehabilitasi balai penyuluhan KB sebanyak 1.017 unit

Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit stunting* 10.280 unit

Penyediaan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk 9.977 Puskesmas dan bantuan operasional KB untuk 6.239 balai penyuluhan KB

Anggaran Kesehatan

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta



Tantangan Kesehatan Indonesia

- ☀ Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran perlunya perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh di Indonesia
- ☀ Kemandirian sediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatan
- ☀ Penyakit katastrofik yang masih tinggi,
- ☀ Ketersediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta pemerataan tenaga kesehatan
- ☀ Mewaspada angka prevalensi *stunting*
- ☀ Kesiapsiagaan terhadap risiko krisis kesehatan di masa depan.

Arah Kebijakan Kesehatan Indonesia

- + Penguatan layanan kesehatan primer, terutama dalam upaya promotif dan preventif;
- + Peningkatan layanan kesehatan sekunder, terutama rumah sakit rujukan dan laboratorium;
- + Percepatan penurunan prevalensi *stunting* melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik.
- + Percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan;
- + Penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi;
- + Peningkatan manfaat program JKN;
- + Peningkatan ketahanan kesehatan, terutama melalui peningkatan ketersediaan, kemandirian dan mutu farmasi dan alat kesehatan serta penguatan sistem kegawatdaruratan;





Anggaran Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial bertujuan untuk menciptakan efek pendapatan yang memungkinkan kelompok berpenghasilan rendah untuk dapat meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan mereka. Pada masa pandemi, alokasi anggaran perlindungan sosial diberikan dalam rangka membantu kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang terdampak pandemi. Di tahun 2020, melalui program pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah mengambil kebijakan *countercyclical* melalui strategi pemberian stimulus fiskal bidang perlindungan sosial yang menjadi bantalan kepada rumah tangga dan

individu yang terdampak agar tidak jatuh miskin atau semakin masuk ke dalam kemiskinan.

Pada tahun 2023, Pemerintah akan terus melanjutkan reformasi program perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Hal ini akan ditempuh melalui upaya sinergi, integrasi, transformasi, dan perluasan program perlinsos yang sudah ada, serta pengembangan program perlinsos lainnya. Disamping itu, untuk mendukung upaya tersebut Pemerintah akan terus melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



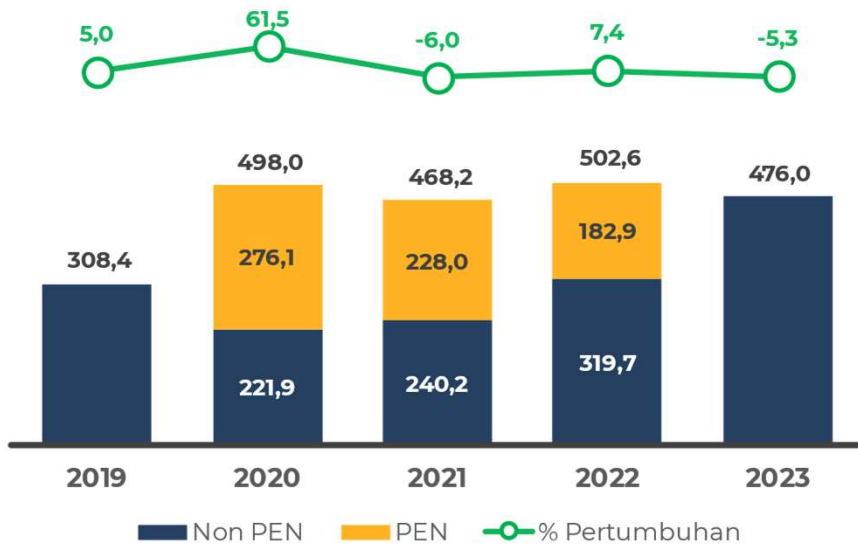
Anggaran

Rp476,0

triliun

Perlindungan Sosial

Penurunan tingkat kemiskinan, pembangunan SDM jangka panjang, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat



Target Output Prioritas



Jumlah penerima **Program Keluarga Harapan (PKH)** bagi **10,0 juta** KPM



Jumlah penerima **bantuan iuran PBI JKN** bagi **96,8 juta** peserta



Jumlah penerima **Program Sembako** bagi **18,8 juta** KPM



Jumlah penerima **Subsidi Listrik** bagi **40,7 juta** Pelanggan



Jumlah penerima **Program Pra Kerja** bagi **500 ribu** peserta



Jumlah penyaluran **Subsidi LPG 3 Kg** bagi **8 juta** metrik ton

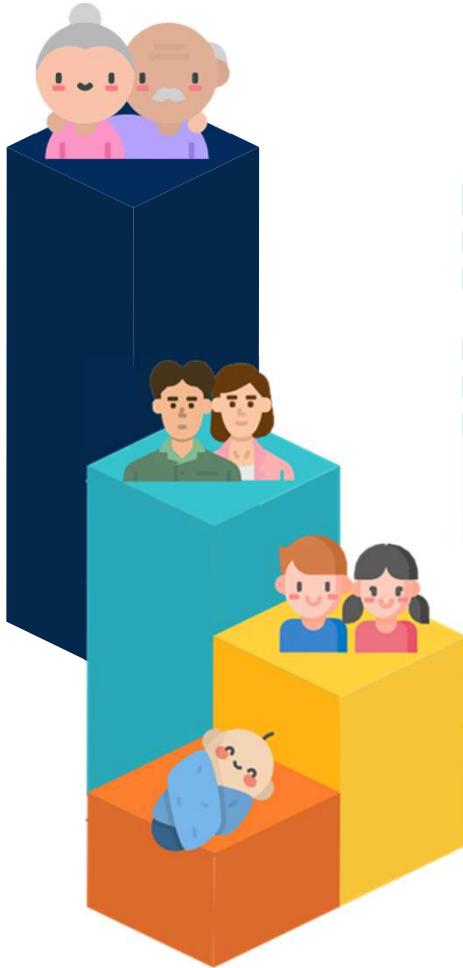


Jumlah penerima **Program Indonesia Pintar (PIP)** bagi **20,1 juta** siswa dan **Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah** bagi **994,3 ribu** mahasiswa (melalui Kemendikbudristek dan Kemenag)



Penyaluran **Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan** untuk **220 ribu** unit rumah

Anggaran Perlindungan Sosial



Tantangan Perlinsos

- **Akurasi data** untuk penargetan program yang belum sepenuhnya akurat
- **Fragmentasi antar program perlinsos** yang belum tersinergi dengan baik
- **Pemberian program** yang belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur
- **Perlunya penguatan program guna** menghasilkan sistem perlinsos yang responsif terhadap krisis di masa depan

Arah Kebijakan Perlinsos



Perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);



Penguatan perlinsos sepanjang hayat termasuk penguatan program bagi lansia dan disabilitas;



Penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan;



Dukungan pelaksanaan perlinsos yang adaptif terhadap krisis.



Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem;





Anggaran Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat menopang kehidupannya dengan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

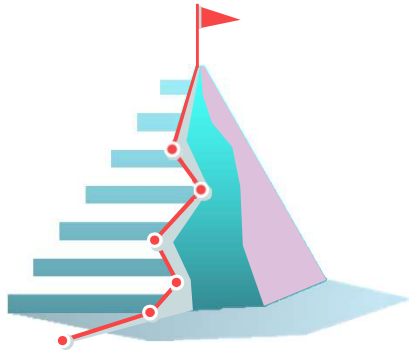
Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain melalui: (1) diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019; (2) perluasan program beasiswa afirmasi/ bidikmisi melalui KIP Kuliah;

(3) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (4) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; (5) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; (6) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19; dan (7) pelaksanaan program guru penggerak.








Selanjutnya, pada tahun 2023 alokasi anggaran pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi.

Anggaran Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing





Tantangan Pendidikan Indonesia


-  Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang belum meningkat signifikan
-  Indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan negara sejawat (*peer countries*)
-  Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata
-  Masih tingginya pengangguran lulusan vokasi
-  Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN
-  Kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan
-  Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal


Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan




 **Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan** melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah);

 **Pemerataan kualitas pendidikan** melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru;

 **Peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)** melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarpras;

 **Peningkatan *link and match* dengan pasar kerja** melalui pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut;

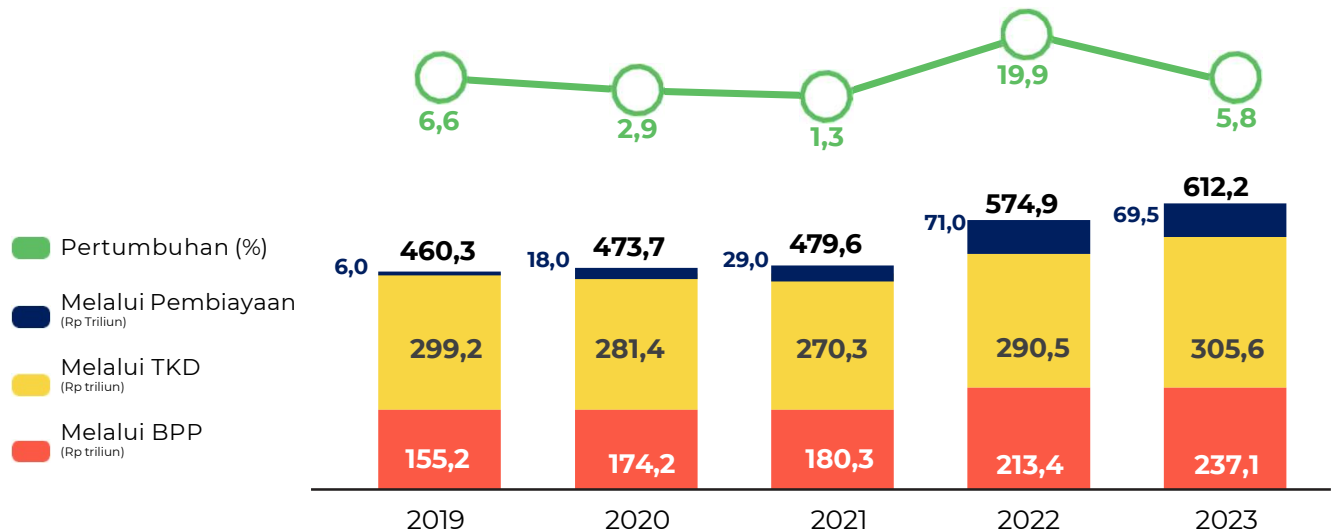
 **Penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda/Pemdes** untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

Anggaran Pendidikan

Rp612,2

triliun

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Anggaran Pendidikan tahun 2023, terdiri dari:

Rp237,1 T

Melalui Belanja Pemerintah Pusat, a.l.



PIP kepada **20,1 juta siswa**
KIP Kuliah kepada **994,3 ribu mahasiswa**
TPG Non PNS untuk **553,5 ribu guru non PNS**

Rp305,6 T

Melalui Transfer ke Daerah , a.l.

BOS untuk **43,7 juta siswa**
BOP PAUD untuk **6,2 juta peserta didik**
BOP Pendidikan Kesetaraan untuk **806 ribu peserta didik**

Rp69,5 T

Melalui Pembiayaan , a.l.

Dana Abadi Pendidikan (termasuk untuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, Dana Abadi Kebudayaan.



Anggaran Infrastruktur

Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi fokus utama pemerintah sejak beberapa tahun terakhir, utamanya infrastruktur penggerak ekonomi dan pelayanan dasar dalam rangka menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, diperlukan juga pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung transformasi digital.

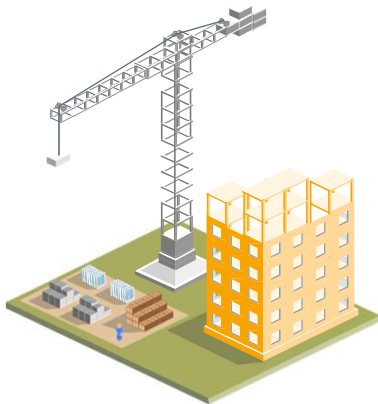
Keberlanjutan pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketersediaan layanan transportasi yang memadai juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja investasi, termasuk pengembangan kawasan prioritas dan strategis (industri, pariwisata dan *food estate*).

Dalam kerangka peningkatan kualitas belanja yang lebih baik, anggaran pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek yang mendukung pengembangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di sektor pariwisata, transportasi, dan industri, yang berdampak terhadap penurunan indeks kemahalan logistik.

Pada tahun 2023 anggaran bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar; (2) mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung aktivitas ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); (4) mendukung penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk dapat beroperasi secara mandiri pada awal tahun 2023; (5) meningkatkan sinergitas pendanaan antar K/L, pusat dan daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.



Tantangan Pembangunan Infrastruktur



Pemenuhan layanan dasar

antara lain akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, termasuk air minum dan sanitasi yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif

Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

antara lain belum optimalnya penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta penggunaan energi baru terbarukan (EBT)

Ketersediaan lahan

terutama kendala pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas lainnya

Infrastruktur konektivitas dan transportasi

antara lain belum terselenggaranya jaringan jalan trans pulau yang berkesinambungan, belum optimalnya angkutan barang kereta api, terbatasnya kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan yang masih belum memadai, dan belum optimalnya peran angkutan penyeberangan dalam menghubungkan pulau-pulau.

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

antara lain belum meratanya penyediaan teknologi digital dan jaringan telekomunikasi, serta perlu optimalisasi layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa

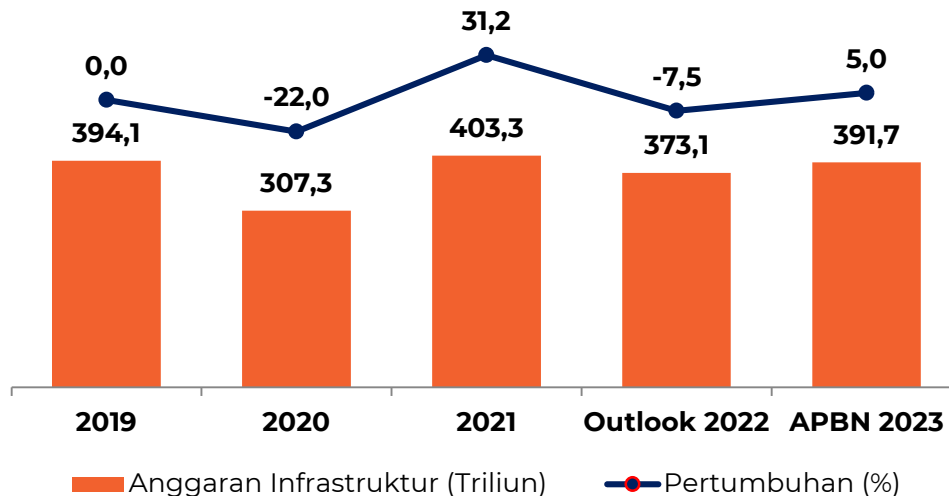


Anggaran Infrastruktur

Rp392,0

triliun

Untuk mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru



Infrastruktur pelayanan dasar



Rumah Susun
5.379 unit dan Rumah
Khusus 3.362 unit



Pembangunan/Rehabilitasi
Sarpras Pendidikan (dasar dan
menengah) 801 unit Sekolah



Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) dengan kapasitas
2.313,6 liter/detik

Infrastruktur energi dan pangan



Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-
Semarang Tahap I (Ruas Semarang-
Batang) 62,4 km



Pembangunan Jaringan irigasi
6.900 Ha dan Rehabilitasi
jaringan irigasi 98.700 Ha



Pembangunan Bendungan Baru
7 unit



Pembangunan PLTS Terpadu
di wilayah 3T 12 unit

Infrastruktur untuk Konektivitas



Jalan baru 522 km, Jalan Bebas
Hambatan 49 km dan
dukungan JTTS



Jembatan baru 13.684 m
Flyover/underpass/terowongan
2.259 m



Jalur Kereta Api (kumulatif) 6.627
km'sp



Bandara Baru 6 Lokasi

Infrastruktur TIK



Penyediaan BTS/Lastmile di 332
lokasi



Penyediaan akses internet baru
9.755 lokasi



Penambahan Kapasitas Satelit
sebesar 8 Gbps

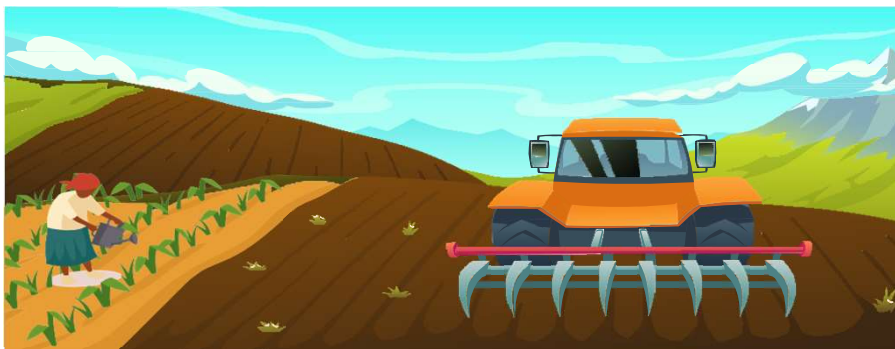
Anggaran Ketahanan Pangan



Ketahanan pangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang tetap menjadi prioritas Pemerintah hingga saat ini. Program-program strategis bidang ketahanan pangan melalui APBN terus diupayakan untuk mewujudkan kemandirian pangan di tengah tantangan yang meningkat dari sisi *supply* dan *demand*, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan optimalisasi potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi yang ada melalui strategi dan kebijakan menyeluruh dan melibatkan lintas sektor.

Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk

Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan nelayan. Anggaran tersebut berfokus kepada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama. Dukungan anggaran dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan *food estate* dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama.



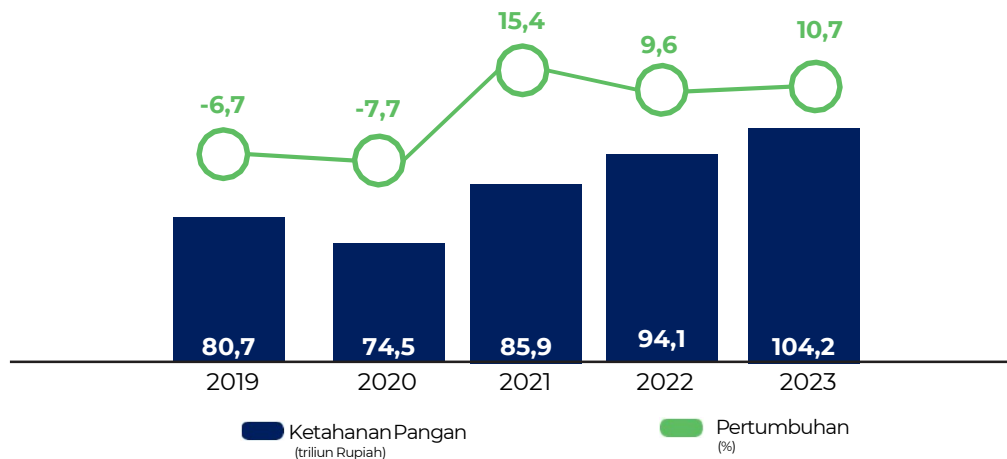
Anggaran

Rp104,2

triliun

Ketahanan Pangan

diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan



Target Output Prioritas

Kawasan padi/Fasilitas penerapan budidaya padi seluas 229.800 Ha

Kawasan jagung/Fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 40.000 Ha

Kawasan kedelai/ Fasilitas penerapan budidaya kedelai seluas 150.000 Ha

Bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit

Benih dan calon induk ikan yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 118 juta ekor

Bantuan sarana chest freezer (peti beku) 300 unit

Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 6.900 Ha oleh pusat

Pembangunan jaringan irigasi seluas 4.812 Ha dan **peningkatan jaringan irigasi** seluas 22.650 Ha oleh daerah

Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 101.913 Ha oleh pusat dan 95.095 Ha oleh daerah

Pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 22 unit dan bendungan baru sebanyak 7 unit

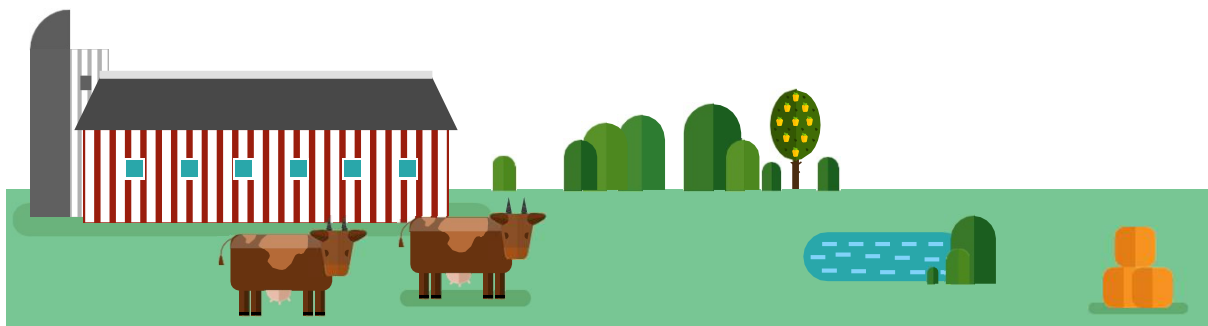
Pembangunan jalan pertanian 2.290 unit

Pembangunan olahan pakan ternak 304 unit

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana 53 pelabuhan perikanan

Pembangunan/rehabilitasi 100 unit **pembenihan**

Dana ketahanan pangan dan pertanian untuk 1.236 kelompok masyarakat



Anggaran

Ketahanan Pangan

diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan



Tantangan

Faktor alam antara lain kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) atau penyakit, dan perubahan iklim mengakibatkan terganggunya produktivitas

Kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil berpotensi mengganggu produksi dan rantai pasokan pangan, menyebabkan tingginya harga komoditas dalam negeri dan menimbulkan risiko krisis pangan

Kualitas SDM seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah dan usia petani yang menua (*aging farmers*)

Digitalisasi pertanian dan tata kelola sistem pangan belum optimal

Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

Meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis

Mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan

Mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi

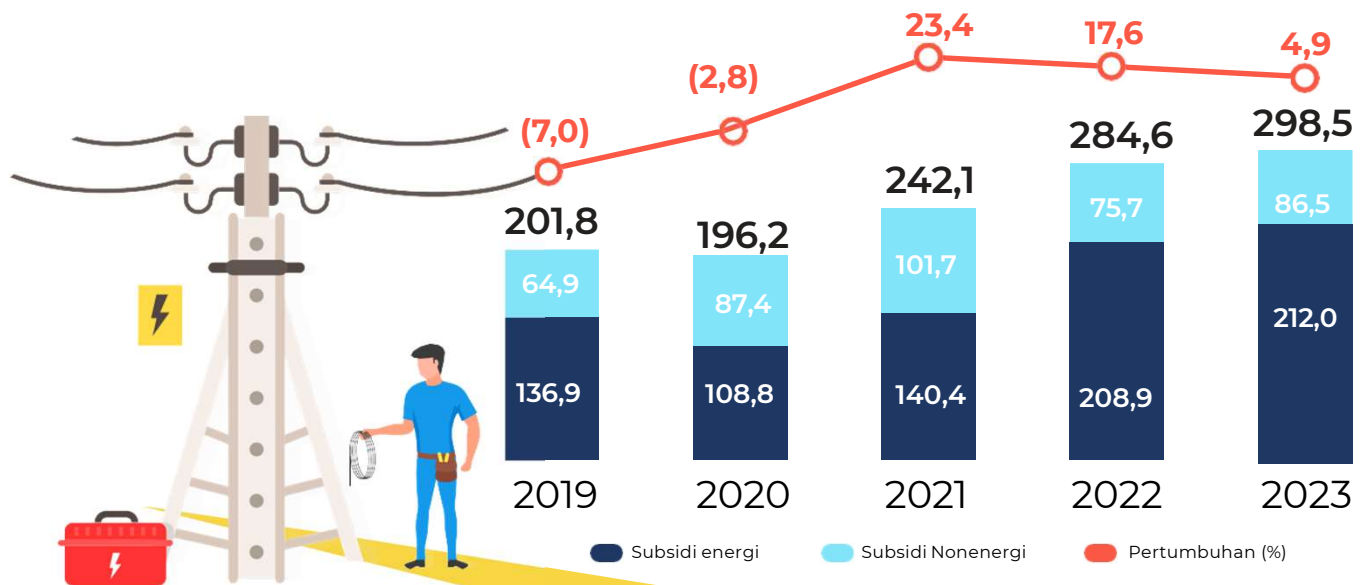
Memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan

Mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk



Anggaran Subsidi

Diarahkan Untuk Stabilisasi Harga dan Menjaga Daya Beli, serta Mendukung UMKM



Kebijakan Subsidi



Subsidi tetapsolar Rp1.000/liter, naik Rp500/liter dari tahun 2022



Mendukung peningkatan pelayanan umum dibidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik



Memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan



Memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR



Pupuk bersubsidi difokuskan pada 2 jenis pupuk (Urea dan NPK) dan 9 jenis komoditas (padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, tebu)



Insentif perpajakan melalui subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah, sebagai stimulus kepada dunia usaha

Subsidi sebesar Rp298,5 T Diarahkan untuk Lebih Tepat Sasaran, Terintegrasi dan Mendukung UMKM, Petani dan Layanan Transportasi Publik

Subsidi Non Energi

- Memperkuat implementasi subsidi pupuk tepat sasaran dengan pembatasan jenis pupuk bersubsidi untuk urea dan NPK kepada komoditas prioritas;
- Meningkatkan kualitas dan inovasi layanan transportasi publik dan digitalisasi layanan informasi dan komunikasi;
- Meningkatkan daya saing usaha dan memperluas permodalan bagi UMKM dan petani;
- Mendukung dunia usaha melalui insentif perpajakan

Subsidi Energi

- Melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan;
- Melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat;
- Memberikan subsidi listrik tepat sasaran dengan diselaraskan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat

Pelaksanaan Transformasi Subsidi Energi dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan

- Kesiapan data penerima berbasis DTKS
- Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat

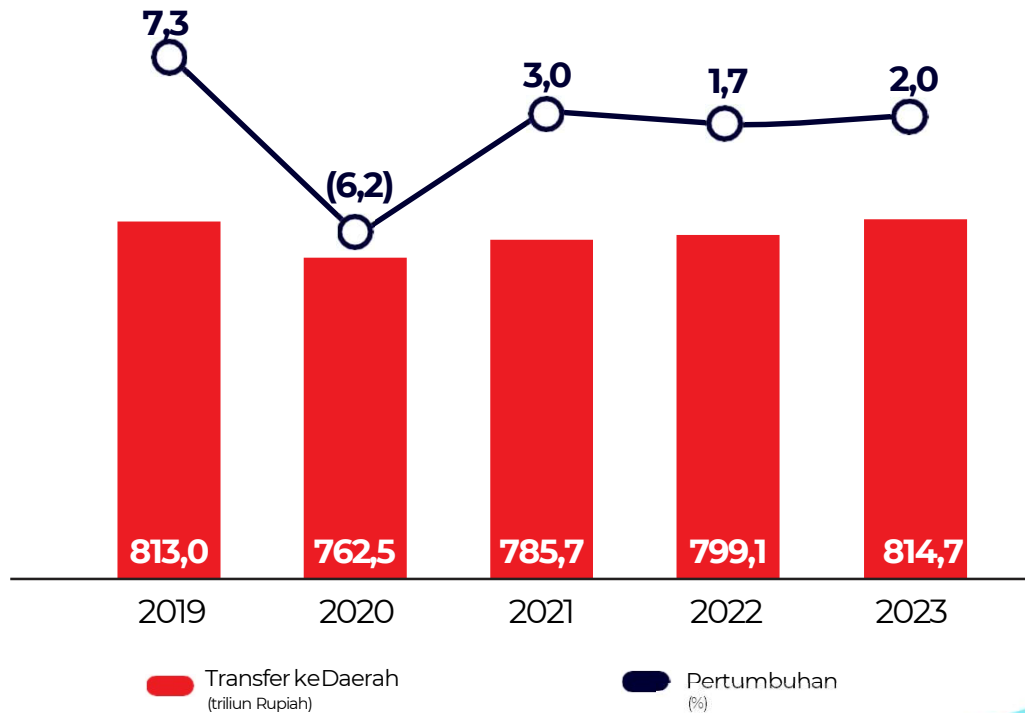


Transfer ke Daerah

Rp814,7

triliun

diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayan publik di Indonesia



Kebijakan



Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah



Memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD



Memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas



Memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas



Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat



Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan

Rencana Pencapaian DAK Fisik



Pendidikan

- Revitalisasi 12.368 Unit Satuan Pendidikan
- Pembangunan 8 Unit Satuan Pendidikan baru
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan 45 Unit



Lingkungan Hidup

- Pembangunan Pusat Daur Ulang 15 Unit
- Pembangunan Bank Sampah Induk 10 Unit
- Pembangunan Rumah Kompos 21 Unit



Pariwisata

Pembangunan Atraksi dan Amenitas Kawasan Wisata di 81 DTW



Jalan

Peningkatan Kemantapan Jalan pada Ruas di 328 Kab/Kota dan 31 Provinsi



Kelautan dan Perikanan

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 53 Pelabuhan
- Pembangunan/Rehabilitasi 100 Unit Pembenihan
- Rehabilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di 92 Kab/Kota



Irigasi

- Pembangunan Jaringan Irigasi 4.812 Ha
- Peningkatan Jaringan Irigasi 22.650 Ha
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi 95.095 Ha



Transportasi Pedesaan

- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 305 km
- Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung 9 Unit



Kehutanan

- Penanaman Hutan Rakyat 827 Ha
- Pembangunan Sumur Resapan 12 Unit



Pertanian

- Renovasi UPTD/Balai Pembenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura 978 UPTD
- Pembangunan Jalan Pertanian 2.290 Unit
- Pembangunan Olahan Pakan Ternak 304 Unit



Kesehatan dan KB

- Penyediaan Puskesmas di 59 Kecamatan
- Pembangunan RS Pratama 18 RS
- Penyediaan Alat Antropometri di 54.963 Puskemas
- Pembangunan/Rehab Balai Penyuluhan KB 1.107 Unit
- Pengadaan BKB Kit Stunting 10.280 Unit



Transportasi Perairan

- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan 52 Pelabuhan
- Pengadaan Sarana Transportasi Perairan 12 Unit



Sanitasi

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 23.964 SR
- SPALD Setempat 144.818 SR



Air Minum

- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan (SPAM) Jaringan Perpipaan 128.151SR
- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 71.501 SR



Perumahan dan Pemukiman

- Rumah yang ditangani sesuai dengan spesifikasi 7500 Unit
- Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang ditangani sesuai dengan spesifikasi 92.400 m



UMKM

Pembangunan 13 Pusat Layanan Usaha Terpadu



IKM

- Pembangunan 8 Sentra IKM
- Revitalisasi 60 Sentra IKM



Perdagangan

Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata 2 Unit



Infrastruktur Energi Terbarukan

Pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid* 0,685 MWp

Rencana Pencapaian DAK Nonfisik



Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Meliputi 43,7 juta siswa untuk BOS Reguler dan 44.140 sekolah kinerja untuk BOS Kinerja



BOK

Untuk 9.977 Puskesmas



BOP PAUD

Untuk 6,2 juta peserta didik dan 3.531 satuan PAUD Penggerak



Dana PK2UMK

Untuk 46,9 ribu Peserta Pelatihan



Tunjangan Profesi Guru ASND

Untuk 998,8 ribu Guru PNSD dan 110,4 ribu Guru PPPK



Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

Untuk Sentra IKM pada 68 Daerah



Tambahan Penghasilan Guru ASND

Untuk 161,6 ribu Guru PNSD dan 365,8 ribu Guru PPPK



Dana Pelayanan Kepariwisatahan

untuk 32.280 peserta pelatihan



Tunjangan Khusus Guru ASND

Untuk 36,5 ribu Guru PNSD dan 6,7 ribu Guru PPPK



BOKB

Untuk 6.239 Balai Penyuluhan KB



BOP Pendidikan Kesetaraan

806 ribu peserta didik



Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan-Anak

untuk 275 Daerah



BOP Museum dan Taman Budaya

Untuk 115 museum dan 23 taman budaya



Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk 1.236 Kelompok Masyarakat



Dana Fasilitasi Penanaman Modal

Pelaksanaan bimbingan teknis bagi 115,4 ribu pelaku usaha

Pembiayaan Anggaran





Kebijakan countercyclical untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi struktural

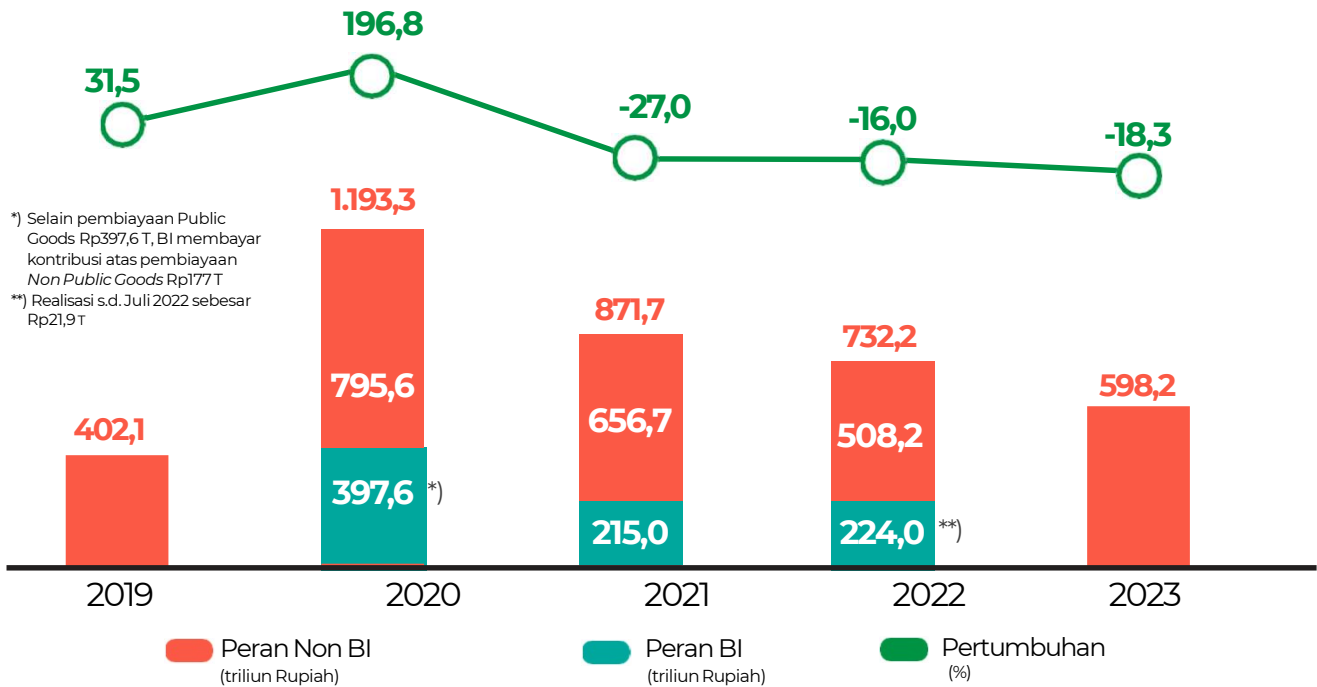
Dalam periode 5 tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan tetap berkesinambungan. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional.

Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (*prudent*) dan berada dalam level *risk appetite*. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung naik dari 1,82 persen terhadap PDB pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019 dan seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020, defisit anggaran naik menjadi 6,14 persen terhadap PDB dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Namun sejak tahun anggaran 2021 dan 2022, defisit anggaran secara bertahap terus turun sehingga pada LKPP tahun 2021 dan *outlook* 2022 defisit menjadi 4,57 persen dan 3,92 persen.

Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 bersifat *countercyclical* dan APBN didorong menjadi *shock absorber* untuk menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2023 merupakan masa penguatan pemulihan ekonomi sekaligus tahun diterapkannya kembali disiplin defisit anggaran di bawah batasan 3 persen terhadap PDB atau kebijakan konsolidasi fiskal. Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. Berkaitan dengan hal tersebut maka defisit APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp598,2 triliun atau sebesar 2,84 persen terhadap PDB.

Pembiayaan Anggaran



- Menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
- Melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*
- Mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel
- Mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*)
- Memanfaatkan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian
- Mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi
- Mendorong inovasi pembiayaan (a.l. penguatan peran BUMN, BLU, SWF, dan SMV serta mendorong skema KPBU yang lebih masif)
- Meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien



Tantangan Pembiayaan Utang, a.l.

- Volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global
- Potensi *capital outflow* dari *emerging market*
- Potensi turunnya minat Investor
- Potensi kenaikan imbal hasil SBN

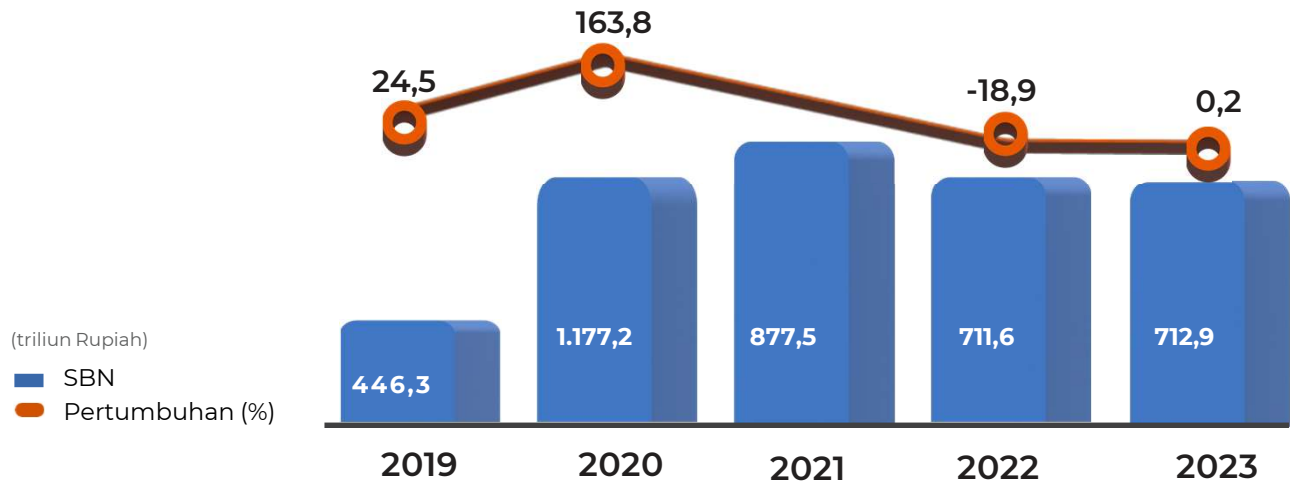
Tantangan Pembiayaan Investasi, a.l.

- Meningkatkan kinerja keuangan BUMN penerima PMN agar lebih sehat dan *profitable*
- Pembinaan BLU penerima PMN yang tersebar di berbagai K/L

Pembiayaan Utang

Pembiayaan Defisit melalui Penerbitan SBN neto sesuai kebutuhan (*last resort*)

SBN 2019-2023 (Triliun Rupiah)



Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Utang

- Utang sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang dikelola secara *prudent*, efisien, dan *sustainable*
- Pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang.
- Mengendalikan risiko utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal
- Mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan biaya dan risiko
- Memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan

Prinsip dan Strategi terkait Pengelolaan Utang

Prudent

Mengendalikan risiko utang dan mengelola utang dengan cermat dan hati-hati untuk mendukung konsolidasi fiskal dan sustainabilitas APBN

Keseimbangan Portofolio

Prioritas penerbitan SBN di pasar domestik untuk mengendalikan risiko

Fleksibel

Mengoptimalkan sumber nonutang
Memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas

Efisien

Pengembangan dan pendalaman pasar (termasuk mendukung penerbitan obligasi/sukuk daerah)



Pembiayaan Investasi

untuk infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan strategis lainnya

Kebijakan

PMN diberikan secara selektif, berdasarkan pertimbangan: sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

Atas usulan investasi dilakukan penilaian kelayakan pada 6 aspek yaitu: urgensi, legal, ekonomi, fiskal, keuangan, lingkungan dan sosial

Sebagian investasi Pemerintah tahun 2023 akan dilakukan setelah dilakukan pemantauan kesiapan dan *progress* pelaksanaan

Klastering



**Klaster
Infrastruktur**
Rp85,3 T

Kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk, listrik desa)

Penyediaan lahan untuk infrastruktur PSN

Dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)



**Klaster
Pendidikan**
Rp20,0 T

Peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren dan untuk pengembangan ristek)



**Klaster
Lainnya**
Rp70,6 T

a.l untuk:
Pembentukan *Pooling Funds* Bencana untuk melindungi masyarakat terdampak bencana

Menjaga kelestarian lingkungan hidup

Memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional





Strategi dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Utang 2023

- Pengelolaan pembiayaan utang yang prudent dan berkelanjutan dengan cara mengendalikan risiko utang pada level yang aman dan kredibel
- Mengutamakan sumber pembiayaan dalam negeri untuk menciptakan kemandirian pembiayaan, Pengadaan utang luar negeri sebagai upaya untuk menghindari *crowding out effect*
- Fleksibilitas pembiayaan utang, baik dari sisi *timing* pengadaan maupun komposisinya, untuk memperoleh biaya dan risiko yang paling *favourable* bagi pemerintah
- Optimalisasi pinjaman program sesuai dengan ketersediaan dan kapasitas pemberi pinjaman
- Optimalisasi penerbitan SBN Ritel untuk memperluas basis investor dan meningkatkan partisipasi investor ritel dalam pembiayaan pembangunan
- Optimalisasi pembiayaan non utang dengan mengikutsertakan peran swasta melalui skema KPBU, pemanfaatan saldo BLU dan optimalisasi SAL
- Berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait dengan tetap memperhatikan integritas dan kredibilitas pasar

Tantangan Pasar Keuangan dan Pembiayaan 2023

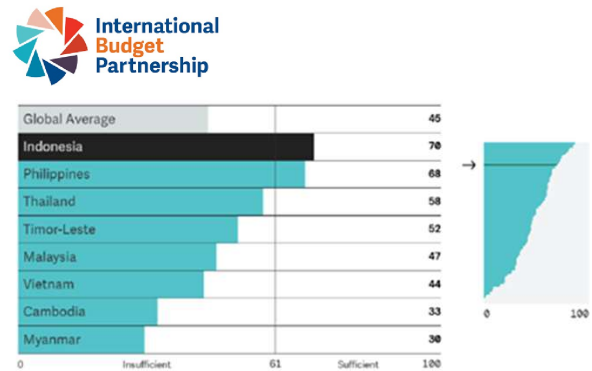
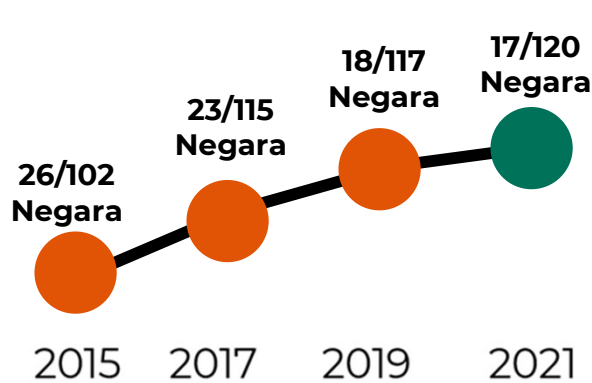
- Volatilitas pasar keuangan global yang masih berlanjut, normalisasi kebijakan moneter the Fed akan berpotensi menimbulkan pengetatan likuiditas global, dan potensi masih berlanjutnya *capital outflow*
- Potensi volatilitas pasar keuangan global juga akan berisiko meningkatkan imbal hasil SBN sebagai dampak dari peningkatan suku bunga UST dan inflasi global yang tinggi
- Pemulihan ekonomi domestik diperkirakan akan mendorong penyaluran kredit, sehingga peran perbankan dalam pembiayaan utang akan terbatas
- Kebutuhan *refinancing* utang pascapandemi hampir di semua negara mengakibatkan ketatnya likuiditas global dan domestik



hai!

we need your opinion

Tahukah anda? Hasil penilaian Open Budget Survey (OBS) tahun 2021, Indonesia mendapat peringkat 17 dari 120 negara di dunia dengan skor 70. OBS diselenggarakan oleh International Budget Partnership.



Buku Informasi APBN adalah salah satu indikator dari penilaian survei tersebut. Oleh karena itu, sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan Buku Informasi APBN selanjutnya, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi survei pada tautan di bawah.

Scan here



bit.ly/surveiinformatiAPBN2023

terima kasih...

**Direktorat
Penyusunan APBN**
menuju Zona Integritas dan Wilayah
Bebas dari Korupsi

PRUDENT

Profesional, Responsif, Unggul,
Dedikatif, Efisien, No Korupsi, Transparan



Informasi **APBN** **2023**

Peningkatan Produktivitas
untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
www.anggaran.kemenkeu.go.id

